



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

SEKRETARIAT KPU

84/PR.03-LP/92/3/2026

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan hikmat dan penyertaan-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2025 Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap kerja Komisi Pemilihan Umum dinyatakan bahwa sekretariat KPU mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, dan salah satu dari tugas sekretariat KPU Provinsi Papua Barat adalah membuat laporan Kinerja yang akan dilaporkan secara berjenjang ke KPU RI. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan dari *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Papua Barat selama tahun anggaran berjalan. Semoga dengan disusunnya LAKIP KPU Provinsi Papua Barat ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU dapat diketahui oleh semua pihak.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Provinsi Papua Barat. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Hasil yang baik untuk Papua Barat yang lebih baik.

Manokwari, 30 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Papua Barat,



M. J. M. M. M.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. KPU Provinsi Papua Barat sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024 maka disusunlah Perjanjian Kinerja, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, dan dari hasil capaian dan evaluasi selama tahun berjalan disusunlah Laporan Kinerja yang penyusunannya berdasarkan DIPA KPU Provinsi Papua Barat Nomor: SP DIPA-076.01.2.654598/2025 tanggal 1 Desember 2024.

Sepanjang tahun 2025, KPU Provinsi Papua Barat memiliki Pagu sebesar Rp. 20.724.799.000 (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 20.713.588.739 (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) sehingga realisasi anggaran KPU Provinsi Papua Barat telah mencapai persentase 99,95% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Lima Persen). Dari pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut telah terlaksana dengan baik, sehingga perlu dipertahankan dan juga mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, melakukan penyusunan program dan perencanaan kerja yang terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat	2
D. Struktur Organisasi KPU Provinsi Papua Barat	4
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis 2020-2024	14
B. Rencana Kerja Tahun 2025	16
C. Perjanjian Kerja Tahun 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja	21
B. Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Undang Undang Dasar 1945, pasal 22 E ayat (5), disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jakarta.

KPU Provinsi Papua Barat mempunyai tugas menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis di tingkat Provinsi Papua Barat. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi Papua Barat dibantu oleh Sekretariat KPU RI dan KPU Kabupaten Se-Papua Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Provinsi Papua Barat sebagai instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban yang didasarkan pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.O3.1-Kpts/O3/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai upaya menciptakan *good governance*, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat. Dalam Laporan Kinerja ini disajikan target dan capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat atas indikator-indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam capaian indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja sasaran lainnya. Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat telah berusaha untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban kinerja tersebut dengan tepat waktu. Laporan Kinerja ini berisi tentang kondisi dan kinerja dari pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan garis besar cakupan visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja.

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU Provinsi Papua Barat adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

## **C. Kedudukan Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU

Provinsi.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi berwenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:

1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu, dan
3. Mengelola Barang Inventaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

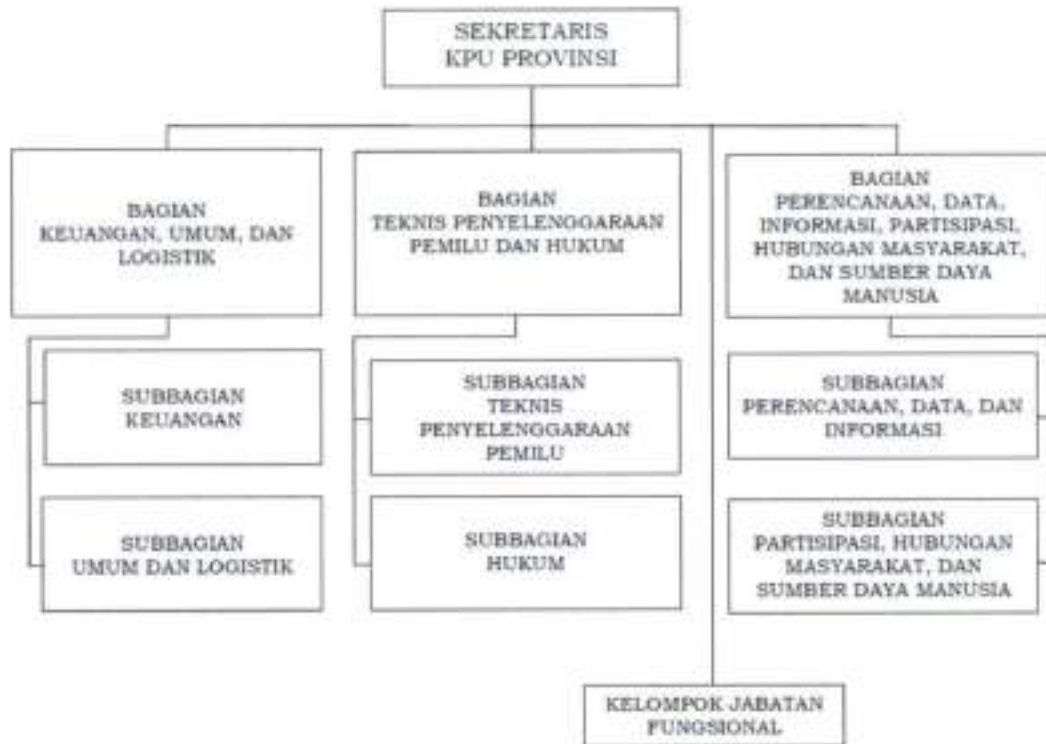
Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat terdiri dari:

1. Sekretaris;
2. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
3. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
4. Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
5. Kelompok JF
6. Subbagian Keuangan;
7. Subbagian Umum dan Logistik;
8. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
9. Subbagian Hukum
10. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
11. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia;

#### **D. Struktur Organisasi KPU Provinsi Papua Barat**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka susunan Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat adalah ditetapkan sebagai Provinsi dengan Tipe B, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi KPU Provinsi Papua Barat



Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga sekretariat yang berkedudukan di ibukota Provinsi dan dipimpin Sekretaris KPU Provinsi serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU. Dalam pelaksanaannya Sekretariat KPU Provinsi dibantu oleh 3 (tiga) Bagian, sebagai berikut:

- Kepala bagian keuangan, umum dan logistik;
- Kepala bagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum; dan
- Kepala bagian perencanaan, data, informasi, partisipasi, hubungan masyarakat dan sumber daya manusia.

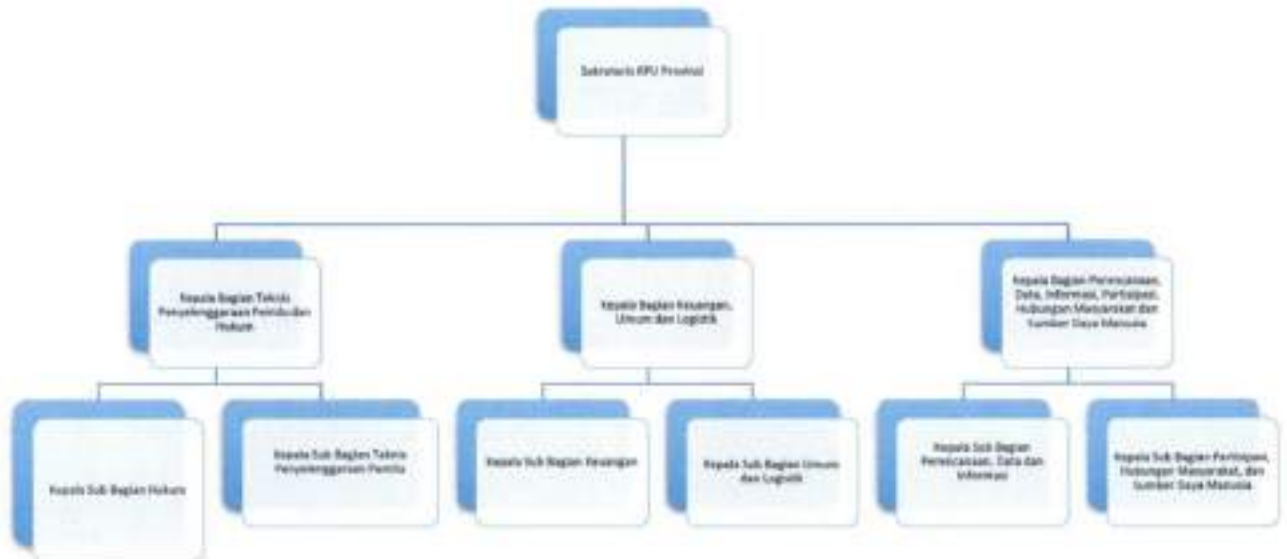
Serta dibantu oleh 6 (enam) Kepala Subbagian (Kasubbag) masing-masing:

- Kepala sub bagian keuangan;
- Kepala sub bagian umum dan logistik;
- Kepala sub bagian teknis penyelenggaraan pemilu;
- Kepala sub bagian hukum;
- Kepala sub bagian perencanaan, data dan informasi; dan
- Kepala sub bagian partisipasi, hubungan masyarakat, dan sumber daya manusia.

Dari yang dilihat dari uraian di atas, maka struktur Organisasi KPU

Provinsi Papua Barat tahun 2025 sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
**Struktur Organisasi KPU Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2025**



Dari struktur organisasi di atas, dapat dilihat semua bagian sudah terisi dan tidak terdapat kekosongan untuk tahun 2025. Semua ini disebabkan karena ada penunjukan langsung dan pertimbangan yang dilakukan oleh sekretaris KPU Provinsi Papua Barat untuk mengisi kekosongan di bagian Kabag dan Kasubag. Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi Keberhasilan satker dalam memenuhi target Rencana Kinerja KPU Provinsi Papua Barat yaitu :

#### 1) **Sumber Daya Manusia di KPU Provinsi Papua Barat**

Dalam melaksanakan kebijakan strategis yang diambil oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat perlu dukungan dari Sekretariat sebagai pelaksana kebijakan, unit pendukung administrasi pelayanan dan pendukung teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

Secara keseluruhan sumber daya manusia aparatur sampai dengan Desember 2025 pada Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat berjumlah 63 Orang ASN yang terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

## 2) Sarana Dan Prasarana

Sarana yang digunakan dan yang dimiliki KPU Provinsi Papua Barat yaitu Gedung Kantor yang terletak di Jalan Brigjen Abraham O Atururi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Prasarana yang dimiliki oleh KPU Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

*Tabel 1.1  
Tabel Rekap Prasarana KPU Provinsi Papua Barat Sampai Per 31  
Desember 2025*

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Hilang
1	Station Wagon	Unit	2	1	-	1	-
2	Mini Bus	Unit	1	1	-	-	-
3	Sepeda Motor	Unit	14	13	-	-	1
4	Scanner (Universal Tester)	Buah	3	-	-	3	-
5	Lemari Penyimpanan	Buah	1	-	-	1	-
6	Lemari Besi/metal	Buah	6	6	-	-	-
7	Lemari Kayu	Buah	1	1	-	-	-
8	Rak Kayu	Buah	1	1	-	-	-
9	CCTV	Buah	33	33	-	-	-
10	Alat Penghancur Kertas	Buah	5	5	-	-	-
11	Mesin Absensi	Buah	2	1	-	1	-
12	LCD Proyektor/infocus	Buah	6	6	-	-	-

13	Focusing Screen	Buah	2	2	-	-	-
14	Papan Pengumuman	Buah	1	1	-	-	-
15	Meja Kerja Besi/metal	Buah	31	31	-	-	-
16	Meja Kerja Kayu	Buah	50	33	-	17	-
17	Kursi Besi/metal	Buah	176	171	-	5	-
18	Kursi Kayu	Buah	6	6	-	-	-
19	sice	Buah	4	4	-	-	-
20	Bangku Panjang Besi/metal	Buah	5	5	-	-	-
21	Meja Rapat	Buah	3	3	-	-	-
22	Sofa	Set	13	13	-	-	-
23	Mesin Penghisap Debu	Buah	4	4	-	-	-
24	Mesin Pemotong Rumput	Buah	3	3	-	-	-
25	Lemari Es	Buah	2	2	-	-	-
26	A.C Split	Buah	19	19	-	-	-
27	Rak Piring Aluminium	Buah	1	1	-	-	-
28	Televisi	Buah	17	17	-	-	-
29	Tape Recorder	Buah	3	3	-	-	-
30	Loundspeaker	Buah	4	4	-	-	-
31	Soundsystem	Buah	19	19	-	-	-

32	Microphone	Buah	10	10	-	-	-
33	Microphone Conference	Buah	6	6	-	-	-
34	Stabilisator	Buah	2	2	-	-	-
35	Lambang Garuda Pancasila	Buah	2	2	-	-	-
36	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	2	2	-	-	-
37	Tiang Bendera	Buah	2	2	-	-	-
38	Tangga Aluminium	Buah	1	-	-	1	-
39	Dispenser	Buah	16	15	-	1	-
40	Mimbar/Podium	Buah	2	2	-	-	-
41	Handy Cam	Buah	3	2	-	1	-
42	Gordyin/Kray	Buah	5	5	-	-	-
43	Kabel Rol	Buah	4	4	-	-	-
44	Kabel	Buah	17	17	-	-	-
45	Tangki Air	Buah	2	2	-	-	-
46	Audio Mixing Console	Buah	3	3	-	-	-
	Audio Ampifier	Buah	1	1	-	-	-
47	Audio Visual	Buah	1		-	1	-
48	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	2	-	-	-
	Microphone/Boom	Buah	4	4	-	-	-

	Stand						
49	Audio Maximizer	Buah	3	3	-	-	-
	Microphone Cable	Buah	2	2	-	-	-
50	Digital LED Running Text	Buah	1	1	-	-	-
51	Digital Keyboard Technics	Buah	1	1	-	-	-
	Peralatan Studio Audio Lainnya	Buah	8	8	-	-	-
52	Video Monitor	Buah	3	3	-	-	-
	Vidio Mixer	Buah	1	1	-	-	-
	Digital Vidio Effect	Buah	1	1	-	-	-
	Lighting Stand Tripod	Buah	2	2	-	-	-
53	Lensa Camera	Buah	2	2	-	-	-
54	Camera Digital	Buah	4	3	-	1	-
55	Video Conference	Buah	11	11	-	-	-
56	Splitter	Buah	1	1	-	-	-
57	Handy Talky (HT)	Buah	3	3	-	-	-
58	Switcher Antena Lainnya	Dummy	1	1	-	-	-
59	Genset	Buah	1	1	-	-	-
60	Clinical Thermometer	Buah	1	-	-	1	-

61	Proyektor Romad Complet	Buah	2	-	-	2	-
62	Alat Kesehatan Olahraga Lainnya	Dummy	1	1	-	-	-
63	Alat Uji Pukul Bola Bulutangkis	Buah	1	1	-	-	-
64	Tripod	Buah	3	3	-	-	-
65	Personal Computer	Buah	1	1	-	-	-
66	Stabilizer/UPS	Buah	1	1	-	-	-
	Ligthing Equipment	Buah	4	4	-	-	-
67	Layar Proyektor	Buah	1	1	-	-	-
	Though Light Box	Buah	1	1	-	-	-
68	PC Unit	Buah	11	11	-	-	-
69	Laptop	Buah	71	59	-	12	-
70	Komputer Unit Lainnya	Buah	4	-	-	4	-
71	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	3	3	-	-	-
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	40	28	-	12	-
73	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	3	-	-	-
	Capture Card	Buah	2	2	-	-	-
74	External/Potable	Buah	14	14	-	-	-

	Hardisk						
75	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Dummy	6	-	-	6	-
76	Hub	Buah	1	1	-	-	-
77	Switch	Buah	3	3	-	-	-
78	Splitter HDMI	Unit	1	1	-	-	-
79	Air Conditioning (AC)	Buah	1	1	-	-	-
80	Alat Tennis Meja	Buah	1	1	-	-	-
<b>Total Jumlah</b>			<b>745</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>1</b>

#### E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

- **KATA PENGANTAR**, Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja
- **IKHTIAR EKSEKUTIF**, Memuat ringkasan berupa pokok isi dari daerah seluruh Laporan Kinerja

#### BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ ikhtiar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

**B. Realisasi Anggaran**

Pada Sub Bagian ini diuraikan kinerja organisasi

**BAB IV**

**PENUTUP**

Lampiran

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi. Sehubungan dengan Tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025 -2029, maka KPU Provinsi Papua Barat menyusun pelaporan Kinerja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra K/L dan RPJMD 2020 - 2024 yang digunakan selama masa transisi. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

##### 1. Visi

Adapun Visi Komisi Pemilihan Umum periode Tahun 2020-2024 adalah: ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”***.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## 2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024. Adapun Misi Komisi Pemilihan Umum dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

## 3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

## 4. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU KProvinsi Papua Barat yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu *"Mewujudkan KPU Provinsi Papua Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas,"* yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Papua Barat yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu, *"Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif"*, yaitu :

1. Terwujudnya Kesadaran Pemilih Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu *"Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil"*, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025**

Rencana kinerja kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2025 masih berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020–2024. Dengan demikian mekanisme Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada rancangan Renstra Komisi Pemilihan Umum tersebut.

Adapun rencana kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2025 melalui 23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1  
Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Papua Barat yang efektif dan efisien	Persentase revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Papua Barat	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara bertingkat kelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
4	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
5	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
6	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi Papua Barat dalam Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%
7	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SAKTI yang Datanya Sesuai dengan Data SAKTI modul aset tetap dan persediaan	100%
8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
9	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dan sesuai aturan pengadaan	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
10	Meningkatkan kualitas layanan Protokol	Persentase Layanan Protokol yang sesuai prosedur standar pelayanan yang berlaku	100%
11	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang dapat ditanggulangi	100%
12	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundangundangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
13	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD dan DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
14	Tersedianya dokumen dan laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	Persentase laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	100%
15	Tersedianya dokumen pemuktahiran data partai politik	Persentase laporan periodik persemester pemuktahiran data partai politik	100%
16	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
17	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi Papua Barat Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%
18	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
19	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%
		Persentasi Dokumen pengukuran kinerja Pegawai KPU Provinsi Papua Barat	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat	100%
20	Terlaksananya sosialisasi dan pendidikan pemilih	Persentase Satker KPU Provinsi Papua Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%
21	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
22	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi	100%

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tersebut tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, sebagai perwujudan sebuah kinerja yang berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerimaamanah; dan

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja di tahun 2025, KPU Provinsi Papua Barat didukung anggaran dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 2.2*

*Pagu Awal Anggaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2025*

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 14.342.355.000
	J u m l a h	Rp. 14.342.355.000

Seiring berjalannya waktu KPU Provinsi Papua Barat mendapatkan anggaran tambahan sehingga Pagu akhir pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 2.3*

*Pagu Akhir Anggaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2025*

No	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 7.524.501.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.558.135.000
	J u m l a h	Rp. 21.082.636.000

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Kinerja KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025 - 2029, sehingga untuk menjawab PK Tahun 2025 KPU Provinsi Papua Barat masih mengacu pada Renstra Tahun 2020 - 2024. Kinerja KPU Provinsi Papua Barat pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Laporan kinerja KPU Provinsi Papua Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, KPU Provinsi Papua Barat mencantumkan 22 (dua puluh dua) Sasaran Strategis dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja sesuai Renstra Tahun 2020-2024 dan dituangkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Tahun Provinsi Papua Barat Tahun 2025. Capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Pencapaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Papua Barat yang efektif dan efisien	Persentase revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Papua Barat	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B	BB	100%
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara bertingkat kelanjutan	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
4	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%
5	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
6	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi Papua Barat dalam Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SAKTI yang	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Datanya Sesuai dengan Data SAKTI modul aset tetap dan persediaan			
8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%	100%	100%
9	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dan sesuai aturan pengadaan	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
10	Meningkatkan kualitas layanan Protokol	Persentase Layanan Protokol yang sesuai prosedur standar pelayanan yang berlaku	100%	100%	100%
11	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
12	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundangundangan	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
13	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD dan DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
14	Tersedianya dokumen dan laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	Persentase laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%
15	Tersedianya dokumen pemuktahiran data partai politik	Persentase laporan periodik persemester pemuktahiran data partai politik	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
16	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%
17	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi Papua Barat Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%	100%	100%
18	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%
19	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%	100%	100%
		Persentasi Dokumen pengukuran kinerja Pegawai KPU Provinsi Papua Barat	100%	100%	100%
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat	100%	100%	100%
20	Terlaksananya sosialisasi dan pendidikan pemilih	Persentase Satker KPU Provinsi Papua Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%
21	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
22	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Papua Barat pada Tahun 2025 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Provinsi Papua Barat dikategorikan "berhasil" karena kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

*Tabel 3.2*  
*Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja*

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 - 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 - 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum KPU Provinsi Papua Barat dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran 1** Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Papua Barat yang efektif dan efisien

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Persentase revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja 1.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2025 pelaksanaan revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah mencapai 100% sesuai kebutuhan, efektif dan efisien.

**Sasaran 2** Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Papua Barat

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang ditunjuk sebagai *pilot project* yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB

Tabel 3.4  
Capaian Indikator Kinerja 2.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang ditunjuk sebagai <i>pilot project</i> yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B	B	B	B	BB	B

Pada Tahun 2025 Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal BB untuk penilaian mandiri RB telah mencapai 100% karena telah melenihi target B.

**Sasaran 3** Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan *e-government* KPU

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara bertingkat kelanjutan

Tabel 3.5  
Capaian Indikator Kinerja 3.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara bertingkat kelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan di 7 KPU Kabupaten. KPU Kabupaten melakukan forum koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait setiap 3 bulan dan KPU Provinsi melakukan forum koordinasi setiap 6 bulan untuk memperoleh dukungan data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Selanjutnya KPU Provinsi Papua Barat menetapkan hasil rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan untuk bulan Juli tahun 2025 Sebanyak 377,655 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 190,413 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 187,242 pemilih yang tersebar di 7 KPU Kabupaten, 86 Distrik/Kecamatan dan 824 Kampung/Desa/Kelurahan.

Rincian hasil rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan bulan Januari sesuai dengan tabel berikut:

*Tabel 3.6*  
Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Semester I

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juli 2025		
				L	P	L+P
1	MANOKWARI	9	173	66.977	66.925	133.902
2	FAKFAK	17	149	29.994	30.279	60.273
3	TELUK BINTUNI	24	117	28.453	25.859	54.312
4	TELUK WONDAMA	13	76	14.570	13.838	28.408
5	KAIMANA	7	86	20.535	20.407	40.942
6	MANOKWARI SELATAN	6	57	13.421	13.466	26.887
7	PEGUNUNGAN ARFAK	10	166	16.463	16.468	32.931
<b>JUMLAH</b>		<b>86</b>	<b>824</b>	<b>190.413</b>	<b>187.242</b>	<b>377.655</b>

2. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar

*Tabel 3.7*  
Capaian Indikator Kinerja 3.2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di KPU Provinsi Papua Barat sudah sangat aman, hanal, dan lancar selama tahun 2025.

**Sasaran 4** Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

*Tabel 3.8*  
*Capaian Indikator Kinerja 4.1 Tahun 2025*

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Presentase dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah keuangan yang disusun dan di sampaikan secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan dengan jumlah laporan yang seharusnya di susun dalam satu tahun anggaran. Adapun beberapa laporan yang di selesaikan oleh bagian keuangan yaitu : LK Tahun 2025, dan LPJ Tahun 2025.

**Sasaran 5** terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan

*Tabel 3.9*  
*Capaian Indikator Kinerja 5.1 Tahun 2025*

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur kemampuan KPU Provinsi Papua Barat dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan pada Sekretariat, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Penyelesaian permasalahan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar pengelolaan keuangan negara. Capaian indikator ini menunjukkan tingkat efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan kualitas tata kelola keuangan pada KPU Provinsi Papua Barat selama Tahun 2025.

**Sasaran 6** Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

1. Persentase KPU Provinsi Papua Barat dalam Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid

Tabel 3.10  
Capaian Indikator Kinerja 6.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase KPU Provinsi Papua Barat dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KPU Provinsi Papua Barat dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang tepat waktu dan valid. Adapun beberapa aplikasi yang di gunakan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2025, yaitu :

1. Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) SAKTI berfungsi sebagai sistem utama pengelolaan keuangan negara di tingkat instansi, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan akuntansi. Aplikasi ini mengintegrasikan proses penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, aset, dan pelaporan keuangan secara *end-to-end*.

2. Aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), OMSPAN berfungsi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara real time. Aplikasi ini digunakan untuk memantau penyerapan anggaran, realisasi belanja, capaian output, serta sebagai bahan analisis kinerja pelaksanaan anggaran.
3. Aplikasi Web Gaji. Web Gaji berfungsi untuk pengelolaan pembayaran gaji ASN, meliputi gaji pokok, tunjangan, potongan, dan perubahan data kepegawaian yang berdampak pada pembayaran gaji. Aplikasi ini memastikan pembayaran gaji dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.
4. Aplikasi GPP P3K (Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) GPP P3K berfungsi untuk penghitungan dan pengelolaan gaji serta hak keuangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aplikasi ini mendukung proses administrasi penggajian PPPK sesuai regulasi dan kontrak kerja yang berlaku.
5. Aplikasi CORTEX, CORTEX berfungsi sebagai sistem pengelolaan dan integrasi data transaksi perpajakan, khususnya dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas belanja negara. Aplikasi ini mendukung kepatuhan perpajakan bendahara dan satuan kerja.
6. Aplikasi MONEV (Monitoring dan Evaluasi) Aplikasi Monev berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk progres fisik dan keuangan. Data Monev digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan laporan kinerja.
7. Aplikasi MONSAKTI, MONSAKTI berfungsi untuk monitoring kualitas data dan konsistensi transaksi keuangan pada Aplikasi SAKTI. Aplikasi ini membantu satuan kerja dalam memastikan kesesuaian data pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan agar selaras dengan sistem perbendaharaan pusat.

**Sasaran 7** Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

1. Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material

Tabel 3.11  
Capaian Indikator Kinerja 7.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Tanah, KPU Prov. Papua Barat Memiliki luas tanah kantor 10.000 m<sup>2</sup> yang sudah PSP namun yang bersertifikat atas nama pemerintah Indonesia cq. KPU RI baru sebagian seluar 9.500 m<sup>2</sup> dan 500 m<sup>2</sup> dalam proses pengurusa.
2. Bangunan, KPU Provinsi Papua Barat memiliki 4 bangunan yaitu : bangunan kantor, bangunan lainnya, dan pagar permanen sudah memiliki PSP, dan 1 bangunan berupa pos jaga belum memiliki SK PSP dan sedang melengkapi berkas permohonan PSP ke KPKNL Sorong.
3. Peralatan dan mesin bernilai besar berupa 14 unit sepeda motor, 2 unit station wagon, 1 unit mini bus, 1 unit genset dan peratan mesin yang harga satuannya diatas Rp.100.000.000 berupa 1 unit televisi dan 3 unit video monitor, 4 unit dari 14 unit sepeda motor, 1 unit genset dan peratan mesin yang harga satuannya diatas Rp.100.000.000 berupa 1 unit televisi dan 3 unit vidio monitor belum

memilik SK PSP dan akan segera diajukan permohonan PSP ke KPKNL Sorong.

2. Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SAKTI yang Datanya Sesuai dengan Data SAKTI modul aset tetap dan persediaan

Tabel 3.12  
Capaian Indikator Kinerja 7.2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SAKTI yang Datanya Sesuai dengan Data SAKTI modul aset tetap dan persediaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KPU Provinsi Papua Barat melalui operator BMN sudah melakukan pengelolaan BMN sesuai peraturan perundang-undangan mulai dari menginputan data pengadaan BMN melalui aplikasi Sakti, pengecekan fisik dan menginventarisasikan BMN, melakukan pemindahan tangan (lelang) dan pengapusan BMN yang rusak berat serta membuat laporan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) BMN Semester 2 dan tahunan tahun 2025.

**Sasaran 8** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

1. Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan

Tabel 3.13  
Capaian Indikator Kinerja 8.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KPU Provinsi Papua Barat telah melaksanakan pengelolaan arsip inaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengelolaan arsip inaktif dilakukan melalui proses penataan, pengelompokan, dan penyimpanan arsip yang telah selesai digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-hari, namun masih memiliki nilai guna administratif, hukum, dan pertanggungjawaban. Seluruh arsip inaktif dikelola berdasarkan klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA), serta pedoman kearsipan yang berlaku, guna menjamin keamanan, keterpeliharaan, kemudahan temu kembali arsip, serta mendukung akuntabilitas dan tertib administrasi di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat.

**Sasaran 9** Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

1. Persentase pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dan sesuai aturan pengadaan

Tabel 3.14  
Capaian Indikator Kinerja 9.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dan sesuai aturan pengadaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung kelancaran dan peningkatan kinerja pegawai agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang diadakan dipastikan berfungsi dengan baik, sesuai dengan kebutuhan kerja, serta dimanfaatkan secara optimal oleh pegawai. Seluruh proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Berikut rincian Sarana dan Prasarana pada Satker KPU Provinsi Papua Barat :

NO	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG			
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG
1.	754	674	0	70	1

**Sasaran 10** Meningkatkan kualitas layanan Protokol

1. Persentase Layanan Protokol yang sesuai prosedur standar pelayanan yang berlaku

*Tabel 3.15*  
*Capaian Indikator Kinerja 10.1 Tahun 2025*

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Layanan Protokol yang sesuai prosedur standar pelayanan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Layanan Protokol pada Satuan Kerja KPU Provinsi Papua Barat diselenggarakan secara profesional dan terstandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang berlaku. Layanan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan kelembagaan KPU Provinsi Papua Barat secara tertib, lancar, dan sesuai dengan kaidah keprotokolan.

Pelaksanaan layanan protokol meliputi perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kegiatan keprotokolan pada acara resmi dan kedinasan, antara lain pengaturan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, serta pengelolaan penerimaan dan pendampingan tamu dinas. Seluruh tahapan layanan dilaksanakan berdasarkan alur pelayanan yang jelas, waktu pelayanan yang terukur, serta pembagian tugas yang terdefinisi sesuai SOP.

Dalam penyelenggaraannya, layanan protokol juga mengedepankan prinsip akuntabilitas, ketepatan prosedur, serta pelayanan prima, dengan memastikan setiap kegiatan terdokumentasi secara administratif dan dilaporkan sesuai ketentuan. Evaluasi atas pelaksanaan layanan dilakukan secara berkala sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap standar pelayanan yang ditetapkan.

Dengan penerapan prosedur standar pelayanan tersebut, layanan Protokol pada Satuan Kerja KPU Provinsi Papua Barat mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

**Sasaran 11** Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat

1. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang dapat ditanggulangi

Tabel 3.16  
Capaian Indikator Kinerja 11.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Papua Barat yang dapat ditanggulangi						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Papua Barat merupakan potensi risiko yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya dalam penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Gangguan keamanan yang dimaksud meliputi ancaman terhadap keselamatan seluruh anggota komisioner, sekretaris, staf sekretariat, keamanan aset dan dokumen, ketertiban lingkungan kantor, serta gangguan eksternal yang masih berada dalam kendali dan dapat diantisipasi oleh satuan kerja.

Gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi tersebut antara lain berupa gangguan ketertiban di lingkungan kantor, potensi konflik internal maupun eksternal yang bersifat non-massal, risiko kehilangan atau kerusakan aset negara, serta potensi kebocoran dokumen penting akibat lemahnya pengamanan administratif dan fisik. Jenis gangguan ini dinilai dapat dikendalikan melalui upaya pencegahan dan penanganan yang terukur.

Penanggulangan gangguan keamanan dilakukan melalui penguatan sistem pengamanan internal dengan diangkatnya pengamanan dalam yaitu Jagatsaksana, peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan setempat, penerapan prosedur operasional standar keamanan, pengawasan akses terhadap lingkungan kantor, serta peningkatan kesadaran dan kedisiplinan pegawai terhadap aspek keamanan. Dengan langkah-langkah tersebut, gangguan keamanan yang bersifat dapat ditanggulangi dapat diminimalkan sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan tugas KPU Provinsi Papua Barat.

#### Sasaran 12 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

1. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundangundangan

Tabel 3.17  
Capaian Indikator Kinerja 12.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam hal terkait pengelolaan produk Hukum pada komisi pemilihan umum provinsi papua barat dokumen Hukum di olah dan di upload agar dapat di akses oleh masyarakat yaitu pada laman JDIH KPU Provinsi Papua Barat. **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Papua Barat** merupakan sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan, yang berfungsi sebagai pusat layanan informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat.

JDIH ini berperan dalam menyediakan akses yang **mudah, cepat, akurat, dan transparan** terhadap berbagai produk hukum dan dokumen hukum, meliputi: Peraturan perundang-undangan terkait pemilihan dan kelembagaan KPU, Keputusan KPU, Surat edaran, Pedoman teknis, Dokumen hukum kelembagaan lainnya.

Pengelolaan JDIH KPU Provinsi Papua Barat dilaksanakan sesuai dengan:

- prinsip **keterbukaan informasi publik**,
- standar pengelolaan dokumentasi hukum nasional, dan
- kebijakan sistem JDIH secara terintegrasi dengan JDIH KPU RI.

Melalui JDIH, KPU Provinsi Papua Barat memastikan bahwa seluruh informasi hukum:

- terdokumentasi secara tertib,
- terarsip secara sistematis,
- mudah ditelusuri (*searchable*),
- dapat diakses oleh publik dan internal organisasi,
- mendukung kepastian hukum, akuntabilitas kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, JDIH menjadi instrumen strategis dalam:

- mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU,
- meningkatkan kualitas layanan informasi hukum,
- memperkuat transparansi kelembagaan,
- serta menunjang pembangunan **Zona Integritas** dan reformasi birokrasi di KPU Provinsi Papua Barat.

2. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan

Tabel 3.18  
Capaian Indikator Kinerja 12.12 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Informasi produk hukum KPU Provinsi Papua Barat disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai bentuk pemenuhan hak publik atas informasi serta dukungan terhadap tertib administrasi kelembagaan. Penyajian informasi dilakukan melalui mekanisme pengelolaan produk hukum yang terstruktur, mulai dari pengumpulan, verifikasi, pengesahan, hingga publikasi dokumen hukum yang meliputi peraturan, keputusan, dan surat edaran KPU.

Kecepatan penyajian diwujudkan dengan memastikan setiap produk hukum yang telah ditetapkan segera diproses dan dipublikasikan melalui media resmi KPU Provinsi Papua Barat. Ketepatan informasi dijamin dengan penyampaian dokumen hukum sesuai substansi, format, dan peruntukannya, sementara akurasi dijaga melalui proses verifikasi dan pengendalian dokumen oleh unit kerja terkait sebelum disebarluaskan kepada publik dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan penyajian informasi produk hukum ini mengacu pada SOP yang berlaku, sehingga menjamin konsistensi proses, kepastian hukum, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Provinsi Papua Barat.

**Sasaran 13** Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

1. Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD dan DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

Tabel 3.19  
Capaian Indikator Kinerja 13.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD dan DPRD Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja						
---	--	--	--	--	--	--

Dalam hal PAW di Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 KPU Provinsi Papua Barat menerima surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Papua Barat berisikan nama orang yang akan di PAW, selanjutnya diplenokan oleh Pimpinan KPU Provinsi Papua Barat yang menghasilkan Berita Acara Pleno, selanjutnya berdasarkan BA dan Surat Pengantar oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Papua Barat dilanjutkan untuk diverifikasi.

Tabel 3.20  
Nama Anggota Dewan Pergantian Antar Waktu

NO	Nama Anggota Dewan	Nama PAW	Nama Partai
1.	Adrianus Mansim	Loius Nelson Rumaikeuw	Golongan Karya

**Sasaran 14** Tersedianya dokumen dan laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan

1. Persentase laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan

Tabel 3.21  
Capaian Indikator Kinerja 14.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki mandat konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Evaluasi ini tidak hanya menjadi kewajiban administrasi, tetapi juga merupakan bagian integral dari mekanisme perbaikan berkelanjutan dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui evaluasi yang komprehensif, KPU dapat memastikan bahwa setiap aspek penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi, keadilan dan akuntabilitas.

KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 22 s/d 23 Februari Tahun 2015 melakukan kegiatan di Kabupaten Kaimana yaitu FGD (*Focus Droup Discussion*) yang mengundang Anggota KPU RI Idham Holik, Kapolda Papua Barat Narasumber, seluruh KPU Kabupaten Se-Papua Barat dan *stakeholder* terkait untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan/Pilkada Tahun 2024, yang kemudian hasil dari pada FGD tersebut dilampirkan pada laporan Tahapan Pemilihan Provinsi Papua Barat Tahun 2025.

Gambar 3.1



**Sasaran 15** Tersedianya dokumen pemuktahiran data partai politik

## 1. Persentase laporan periodik persemester pemuktahiran data partai politik

*Tabel 3.22*  
*Capaian Indikator Kinerja 15.1 Tahun 2025*

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase laporan periodik persemester pemuktahiran data partai politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Peserta Pemilihan pada pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Papua Barat yaitu :

1. Partai Nasdem
2. Partai Gerindra
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Demokrat
6. Partai Perindo
7. Partai Kebangkitan Bangsa
8. Partai Amanat Nasional
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Keadilan Sejahtera
11. Partai Hanura
12. Partai Gelora Indonesia
13. Partai Solidaritas Indonesia

14. Partai Buruh
15. Partai Garda Republik Indonesia
16. Partai Bulan Bintang
17. Partai Ummat

Partai PKN tidak termasuk menjadi partai pengusung dalam pemilihan Gubernur Provinsi Papua Barat.

**Sasaran 16** Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

1. Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat

Tabel 3.23  
Capaian Indikator Kinerja 16.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase pegawai di Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh pegawai telah menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Layanan tersebut meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, seperti pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, pengelolaan data kepegawaian, cuti, penilaian kinerja, serta hak dan kewajiban pegawai lainnya.

Capaian 100% ini mencerminkan efektivitas dan profesionalisme

pengelolaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat, di mana setiap permohonan dan kebutuhan pegawai dapat diproses secara tepat waktu, akurat, dan tanpa keterlambatan. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan komitmen Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat dalam memberikan pelayanan internal yang berkualitas guna mendukung kinerja organisasi secara optimal dan berkelanjutan. Berikut layanan pegawai di lingkungan sekretariat KPU Provinsi Papua Barat :

1. Layanan Izin/Tugas Belajar selama tahun 2025 terdapat 5 (lima) orang PNS dan 2 (dua) orang Anggota Komisioner yang mengajukan Izin/Tugas Belajar ke KPU RI secara berjenjang melalui KPU Provinsi Papua Barat.
2. Layanan Kenaikan Pangkat berupa Kenaikan Pangkat Pilihan dan Kenaikan Pangkat Reguler Non Jabatan/Struktural bagi PNS di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang telah memenuhi kriteria masa kerja untuk mendapatkan Kenaikan Pangkat yang dilaksanakan setiap periode (Januari-Desember).
3. Layanan Mutasi Pegawai dilaksanakan bagi PNS yang ingin mengajukan Mutasi/Pindah Tugas dengan tetap memperhatikan peraturan dan persyaratan Mutasi/ Pindah Tugas di Lingkungan Sekretariat KPU.
4. Layanan Pencantuman gelar dilaksanakan dan diproses melalui layanan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Selama tahun 2025 terdapat 3 (tiga) orang ASN yang mengajukan usul Pencantuman Gelar.
5. Layanan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat dilaksanakan untuk 12 (dua belas) orang PNS yang telah memiliki pangkat Pengatur Tk.I/(II/d), sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 367/SDM.03.1-SD/04/2025 tanggal 14 Oktober 2025 bagi PNS perihal : pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

**Sasaran 17** Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi Papua Barat Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

1. Persentase Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan

Tabel 3.24  
Capaian Indikator Kinerja 17.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seleksi anggota KPU Provinsi Papua Barat dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari pembentukan tim seleksi, tahapan administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, hingga penetapan dan pelantikan anggota terpilih. Dengan tercapainya persentase 100%, hal ini mencerminkan bahwa seluruh anggota KPU Provinsi Papua Barat telah diseleksi dan ditetapkan tepat sesuai periode masa jabatan, sehingga kesinambungan kepemimpinan dan pelaksanaan tugas kelembagaan KPU dapat berjalan efektif, tertib, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU

Provinsi Papua Barat periode 2025-2030 dilaksanakan dengan tahapan :

1. Pengumuman dan Penerimaan Pendaftaran pada tanggal 06 - 17 Mei 2025
2. Penelitian Administrasi pada tanggal 06-24 Mei 2025
3. Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi pada tanggal 02-03 Juni 2025
4. Tes Kesehatan dan Wawancara dan tanggal 16-18 Juni 2025
5. Penyampaian Nama Calon Anggota KPU tanggal 25-26 Juni 2025

Rincian jumlah peserta seleksi :

1. 60 orang yang lulus seleksi administrasi
2. 20 orang yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi
3. 10 orang yang lulus seleksi tes kesehatan dan wawancara

Seluruh rangkaian proses seleksi Anggota Komisioner Provinsi Papua Barat Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Sasaran 18 Tersedianya data dan informasi kepegawaian

1. Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi

Tabel 3.25  
Capaian Indikator Kinerja 18.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Data kepegawaian KPU se-Provinsi Papua Barat telah tercatat secara baik, lengkap, dan akurat dalam basis data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). SIMPEG digunakan sebagai sarana utama pengelolaan data pegawai yang mencakup identitas pegawai, riwayat pendidikan, kepangkatan, jabatan, penilaian kinerja, mutasi, hingga data kepegawaian lainnya.

Pengelolaan data dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan oleh masing-masing satuan kerja, dengan memperhatikan prinsip validitas, ketepatan waktu, dan kesesuaian dengan dokumen pendukung yang sah. Setiap pembaruan data dilakukan sesuai prosedur dan standar operasional yang berlaku, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan dan memastikan konsistensi data antar unit kerja.

Dengan tercatatnya data kepegawaian secara baik dan akurat dalam SIMPEG, KPU Provinsi Papua Barat memiliki basis data yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang kepegawaian, perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan SDM, serta penyusunan laporan kepegawaian yang akuntabel dan transparan.

**Sasaran 19** Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai

#### 1. Persentase Penegakan Disiplin Pegawai

Tabel 3.26

##### Capaian Indikator Kinerja 19.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Terlaksana Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Berupa Surat Teguran dan Panggilan

Melaksanakan Tugas Bagi Komisioner, Sekretaris dan Staf Sekretariat yang tidak melaksanakan tugas / masuk kantor sesuai ketentuan.

Sebanyak 21 Dokumen (Surat Teguran, Panggilan Masuk Kantor, Peringatan dan Klarifikasi) bagi Pegawai yang tidak menaati aturan kepegawaian sepanjang tahun 2025.

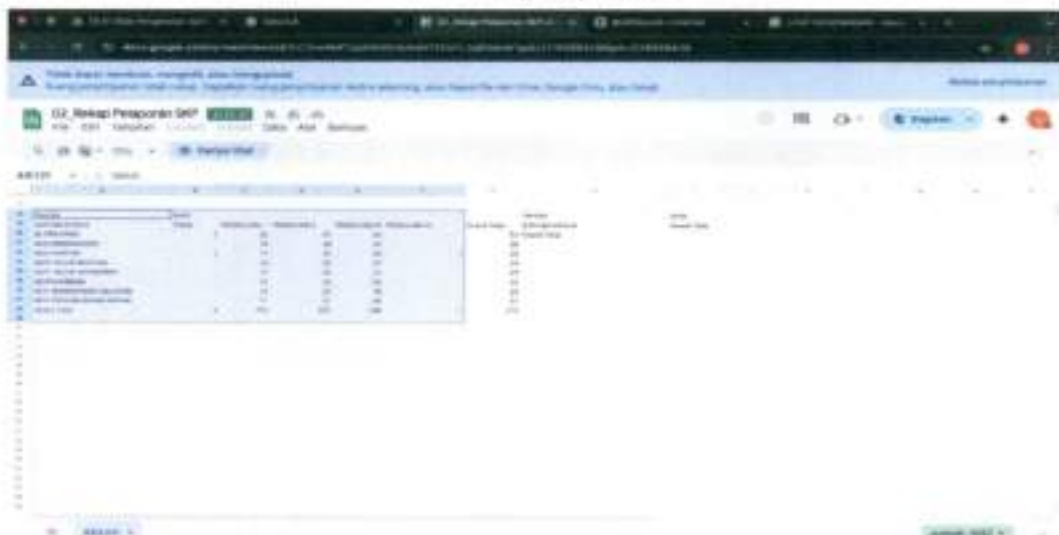
## 2. Persentasi Dokumen pengukuran kinerja Pegawai KPU Provinsi Papua Barat

Tabel 3.27  
Capaian Indikator Kinerja 19.2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentasi Dokumen pengukuran kinerja Pegawai KPU Provinsi Papua Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengukuran Kinerja Pegawai KPU Provinsi Papua Barat dilaksanakan melalui Pembuatan Laporan Kinerja Harian (LKH) yang dibuat setiap periode dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang di buat dan di laporkan secara Triwulan dalam tahun berjalan.

Gambar 3.3



Tabel 3.28  
Capaian Indikator Kinerja 19.3 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Terlaksana Layanan Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat, berupa :

- a. Layanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) : 23 (dua puluh tiga) orang ASN yang mendapat Kenaikan Gaji Berkala di tahun 2025
- b. Santunan Anak Yatim : Pelaksanaan Santunan dan Doa Bersama Anak Yatim di lakukan secara serentak di Sekretariat Jenderal KPU Pada tanggal 25 Juli 2025 sesuai Surat Sekjend Nomor : 2458/SDM.06.7-SD/03/2025
- c. Layanan BPJS : Layanan BPJS bagi Anggota KPU dan Pimpinan dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat yang di lakukan perpanjangan secara berkala setiap tahun
- d. Penghargaan Bagi ASN : Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun bagi 2 (dua) orang PNS di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Fakfak

**Sasaran 20** Terlaksananya sosialisasi dan pendidikan pemilih

1. Persentase Satker KPU Provinsi Papua Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum

Tabel 3.29  
Capaian Indikator Kinerja 20.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Satker KPU Provinsi Papua Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KPU Provinsi Papua Barat memiliki program Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat umum dalam proses pemilihan dan kehidupan demokrasi. Pendidikan ini dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai metode sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyebaran informasi pemilihan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Program ini bertujuan membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga mampu menggunakan hak pilihnya secara sadar sesuai prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**Sasaran 21** Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

1. Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

*Tabel 3.30*  
*Capaian Indikator Kinerja 21.1 Tahun 2025*

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Permohonan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat ditindaklanjuti melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Selama Tahun 2025, tidak terdapat permohonan informasi yang disertai pengaduan atau keberatan dari pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik telah dilaksanakan secara tertib, responsif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mencerminkan terpenuhinya prinsip keterbukaan informasi dan kepuasan pemohon informasi.



Tabel 3.31  
Capaian Indikator Kinerja 22.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Tahun 2025		Capaian Target Tahun 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KPU Provinsi Papua Barat melaksanakan penyampaian informasi dan publikasi kepada masyarakat melalui berbagai media publikasi resmi sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Informasi yang disampaikan mencakup kebijakan, program, kegiatan, tahapan pemilu dan pemilihan, serta informasi kelembagaan lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi KPU.

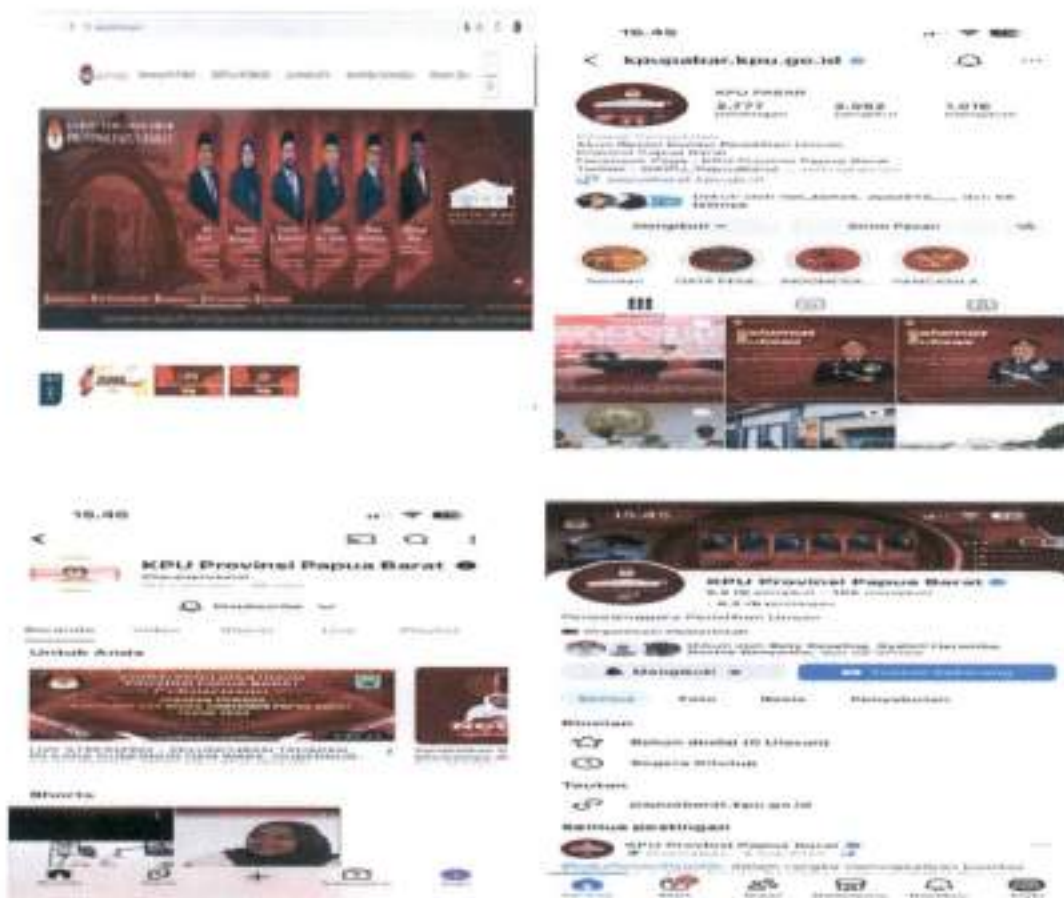
Penyampaian informasi dilakukan melalui media publikasi yang dikelola secara resmi, antara lain website KPU Provinsi Papua Barat, media sosial resmi, siaran pers, serta media publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Setiap informasi yang ditampilkan disusun secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaannya, KPU Provinsi Papua Barat memastikan bahwa proses publikasi dilakukan secara tepat waktu dan berkelanjutan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang mutakhir dan terpercaya. Selain itu, publikasi informasi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Melalui penyampaian informasi dan publikasi yang terbuka dan transparan, KPU Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk mendukung

terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Gambar 3.3



## B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan SP DIPA-076.01.2.654598/2025 Revisi Terakhir anggaran KPU Provinsi Papua Barat untuk 2 (dua) Program sebesar Rp 20.724.799.000 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian masing-masing program sebagaimana berikut :

Tabel 3.32  
Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Sisa Anggaran
<b>Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>				
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	7.166.664.000	7.166.636.771	100%	27.229
<b>Program dukungan manajemen</b>				
Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	13.558.135.000	13.546.951.968	99,92%	11.183.032

Gambar 3.4



Sumber : [myintress.kemenkeu.go.id](http://myintress.kemenkeu.go.id)

## BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan transparansi atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam penyelenggaraan tahapan demokrasi di wilayah Provinsi Papua Barat. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Provinsi Papua Barat berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2020–2024, Rencana Kinerja Tahunan 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sepanjang tahun 2025, KPU Provinsi Papua Barat telah berupaya maksimal dalam mengelola sumber daya dan anggaran guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, terutama dalam menjaga integritas proses dan kualitas layanan kepada pemilih. Kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari dukungan dan sinergi yang baik dengan Pemerintah Daerah, aparat keamanan, peserta pemilu, serta seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja serta menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemilihan umum dan pemilihan serentak di masa mendatang. Segala kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan kinerja tahun 2025 akan menjadi catatan penting bagi kami untuk melakukan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan demokrasi yang lebih kuat dan berkualitas di Provinsi Papua Barat.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan agenda nasional di daerah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati upaya kita dalam membangun daerah dan bangsa.

# LAMPIRAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
PROVINSI PAPUA BARAT



**PERJANJIAN  
KINERJA  
2025**





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

*PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025*

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FRANCIS EDWARD MAKABORY  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Manokwari, 25 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



FRANCIS EDWARD MAKABORY

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Papua Barat	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Papua Barat	B
		Presentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Papua Barat	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Papua Barat	100%
2	Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan	100%
3	Terlaksananya sosialisasi dan pendidikan pemilih	Persentase Satker KPU Provinsi Papua Barat terhadap pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi Papua Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%

**Program**

**Anggaran**

Program Dukungan Manajemen

Rp

20.952.018.000

Manokwari, 25 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



FRANCIS EDWARD MAKABORY



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

*PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025*

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MICHAEL MOTE  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FRANCIS EDWARD MAKABORY  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK KEDUA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**FRANCIS EDWARD MAKABORY**

PIHAK PERTAMA

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**MICHAEL MOTE**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

*PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025*

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HAJRA AHMAD  
Jabatan : Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN  
HUKUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

HAJRA AHMAD

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

MICHAEL MOTE



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

*PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025*

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DOMINGGUS KAMBU

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM  
DAN LOGISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**DOMINGGUS KAMBU**

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**MICHAEL MOTE**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

*PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025*

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENRY JACKSON  
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya  
Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BAGIAN RENDATIN, PARMAS  
DAN SDM  
PROVINSI PAPUA BARAT

HENRY JACKSON

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

MICHAEL MOTE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Papua Barat yang efektif dan efisien	Persentase revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Papua Barat	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
4	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
5	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
6	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi Papua Barat dalam Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%
7	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SAKTI yang Datanya Sesuai dengan Data SAKTI modul aset tetap dan persediaan	100%
8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%
9	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dan sesuai aturan pengadaan	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
10	Meningkatkan kualitas layanan Protokol	Persentase Layanan Protokol yang sesuai prosedur standar pelayanan yang berlaku	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
11	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang dapat ditanggulangi	100%
12	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundangundangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
13	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD dan DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
14	Tersedianya dokumen dan laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	Persentase laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	100%
15	Tersedianya dokumen pemuktahiran data partai politik	Persentase laporan periodik persemester pemuktahiran data partai politik	100%
16	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
17	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi Papua Barat Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%
18	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
19	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%
		Persentasi Dokumen pengukuran kinerja Pegawai KPU Provinsi Papua Barat	100%
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat	100%
20	Terlaksananya sosialisasi dan pendidikan pemilih	Persentase Satker KPU Provinsi Papua Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%
21	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
22	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah,	Persentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)		

**Program**

**Anggaran**

1. Program Dukungan Manajemen

Rp 20.952.018.000

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK KEDUA  
PROVINSI PAPUA BARAT



FRANCIS EDWARD MAKABORY

PIHAK PERTAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT



MICHAEL MOTE



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

*PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025*

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARQALINE E. KAIWAY

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
LOGISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT

MARQALINE E. KAIWAY

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



MICHAEL MOTE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SAKTI yang Datanya Sesuai dengan Data SAKTI modul aset tetap dan persediaan	100%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dan sesuai aturan pengadaan	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4	Meningkatkan kualitas layanan Protokol	Persentase layanan protokol yang sesuai prosedur standar pelayanan yang berlaku	100%
5	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang dapat ditanggulangi	100%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

*PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025*

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KURNIAWAN EKO SAMBODO  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : MICHAEL MOTE  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



MICHAEL MOTE

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU  
PROVINSI PAPUA BARAT

KURNIAWAN EKO SAMBODO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
 SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD dan DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
2	Tersedianya dokumen dan laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	Persentase laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	100%
3	Tersedianya dokumen pemuktahiran data partai politik	Persentase laporan periodik persemester pemuktahiran data partai politik	100%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

*PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025*

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ROBISON ONICIUS JEUJANAN

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

MICHAEL MOTE

PIHAK PERTAMA  
PLT. KEPALA SUB BAGIAN HUKUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

ROBISON ONICIUS JEUJANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundangundangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

---

*PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025*

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HERLINA MARGARETHA ISIR

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



MICHAEL MOTE

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
PROVINSI PAPUA BARAT

HERLINA MARGARETHA ISIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
2	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi Papua Barat dalam Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

*PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025*

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADOLOF APNER MANDACAN

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



MICHAEL MOTE

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,  
DATA DAN INFORMASI  
PROVINSI PAPUA BARAT

ADOLOF APNER MANDACAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
 SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Papua Barat yang efektif dan efisien	Persentase revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Papua Barat	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

*PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025*

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TRI HARTINI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 25 Agustus 2025

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



MICHAEL MOTE

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA  
MANUSIA, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN  
MASYARAKAT  
PROVINSI PAPUA BARAT

TRI HARTINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
2	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi Papua Barat Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%
3	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
4	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%
		Persentasi Dokumen pengukuran kinerja Pegawai KPU Provinsi Papua Barat	100%
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat	100%
5	Terlaksananya sosialisasi dan pendidikan pemilih	Persentase Satker KPU Provinsi Papua Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%
6	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
7	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi	100%



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Unit Organisasi** : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Satuan Kerja** : 654598 **KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

Hal 1 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>20,724,799,000</b>	<b>0</b>	<b>18,827,691,792</b>	<b>1,885,896,947</b>	<b>20,713,588,739</b>	<b>99.95 %</b>	<b>11,210,261</b>
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	7,166,664,000	0	7,121,795,771	44,841,000	7,166,636,771	100.00	27,229
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	7,116,664,000	0	7,116,661,771	0	7,116,661,771	100.00	2,229
<b>BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>	<b>7,116,664,000</b>	<b>0</b>	<b>7,116,661,771</b>	<b>0</b>	<b>7,116,661,771</b>	<b>100.00</b>	<b>2,229</b>
<b>BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi</b>	<b>7,116,664,000</b>	<b>0</b>	<b>7,116,661,771</b>	<b>0</b>	<b>7,116,661,771</b>	<b>100.00</b>	<b>2,229</b>
<b>051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi</b>	<b>7,116,664,000</b>	<b>0</b>	<b>7,116,661,771</b>	<b>0</b>	<b>7,116,661,771</b>	<b>100.00</b>	<b>2,229</b>
051.OA Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000054. ATK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.HA Perencanaan Program dan Anggaran	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	100.00	0
000057. Ekspose Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu Tahun 2024	320,000,000	0	320,000,000	0	320,000,000	100.00	0
000065. Koordinasi Penyusunan Instrumen Evaluasi Pilkada Tahun 2024	340,000,000	0	340,000,000	0	340,000,000	100.00	0
000066. Rapat Koordinasi Persiapan Pemenuhan Logistik Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	100.00	0
000067. Penyampaian Laporan Hasil Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Hasil Pilkada Tahun 2024 Pasca Penetapan	420,000,000	0	420,000,000	0	420,000,000	100.00	0
051.HM Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara	14,712,000	0	14,712,000	0	14,712,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	14,712,000	0	14,712,000	0	14,712,000	100.00	0
000064. Honor Pengelola Keuangan APBD Januari s/d Maret 2025	14,712,000	0	14,712,000	0	14,712,000	100.00	0
051.HO Rapat Kerja	210,915,000	0	210,914,900	0	210,914,900	100.00	100
521211 Belanja Bahan	210,915,000	0	210,914,900	0	210,914,900	100.00	100
000058. ATK dan Penggandaan Laporan Tahapan Pilkada	210,915,000	0	210,914,900	0	210,914,900	100.00	100
051.HP Perjalanan Dinas	1,595,467,000	0	1,595,466,822	0	1,595,466,822	100.00	178
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,595,467,000	0	1,595,466,822	0	1,595,466,822	100.00	178

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Unit Organisasi** : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Satuan Kerja** : 654598 **KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

Hal 2 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000059. Sengeketa Perselisihan Hasil Pilkada	520,000,000	0	520,000,000	0	520,000,000	100.00	0
000068. Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024	485,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000	100.00	0
000069. Reviu Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan Tahun 2024	325,000,000	0	325,000,000	0	325,000,000	100.00	0
000070. Pengantaran Arsip Pemilu Tahun 2024 dan Koordinasi Tindak Lanjut Arsip Pemilihan Tahun 2024	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000	100.00	0
000071. Rapat Koordinasi Evaluasi Hukum dan Pengawasan serta Mitigasi Permasalahan Hukum Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	140,467,000	0	140,466,822	0	140,466,822	100.00	178
051.HQ Evaluasi dan Pelaporan	1,718,122,000	0	1,718,121,129	0	1,718,121,129	100.00	871
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,633,216,000	0	1,633,215,169	0	1,633,215,169	100.00	831
000061. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Dukungan Pilkada 2024	1,633,216,000	0	1,633,215,169	0	1,633,215,169	100.00	831
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84,906,000	0	84,905,960	0	84,905,960	100.00	40
000060. Paket Meeting Kegiatan Evaluasi	84,906,000	0	84,905,960	0	84,905,960	100.00	40
051.OE Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,265,647,000	0	1,265,646,920	0	1,265,646,920	100.00	80
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,265,647,000	0	1,265,646,920	0	1,265,646,920	100.00	80
000062. Meubelier (Sofa, Kursi, dan Meja)	365,647,000	0	365,646,920	0	365,646,920	100.00	80
000072. Laptop, Printer, Scanner, PC	900,000,000	0	900,000,000	0	900,000,000	100.00	0
051.PB Pokja Tingkat Kabupaten	1,111,800,000	0	1,111,800,000	0	1,111,800,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,111,800,000	0	1,111,800,000	0	1,111,800,000	100.00	0
000063. Honor Pokja 6 Kabupaten	1,111,800,000	0	1,111,800,000	0	1,111,800,000	100.00	0
CQ.7016 Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	50,000,000	0	5,134,000	44,841,000	49,975,000	99.95 %	25,000
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	50,000,000	0	5,134,000	44,841,000	49,975,000	99.95 %	25,000
QDB.002 Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	50,000,000	0	5,134,000	44,841,000	49,975,000	99.95 %	25,000
111 Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	50,000,000	0	5,134,000	44,841,000	49,975,000	99.95 %	25,000
111.0A Sosialisasi Pendidikan Pemilih	50,000,000	0	5,134,000	44,841,000	49,975,000	99.95 %	25,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,000,000	0	5,134,000	44,841,000	49,975,000	99.95 %	25,000
000104. Peralatan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Podcast	50,000,000	0	5,134,000	44,841,000	49,975,000	99.95 %	25,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Unit Organisasi** : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Satuan Kerja** : 654598 **KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

Hal 3 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
WA Program Dukungan Manajemen	13,558,135,000	0	11,705,896,021	1,841,055,947	13,546,951,968	99.92 %	11,183,032
WA.3355 Pengelolaan Keuangan	6,313,181,000	0	5,639,619,611	662,976,281	6,302,595,892	99.83 %	10,585,108
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,313,181,000	0	5,639,619,611	662,976,281	6,302,595,892	99.83 %	10,585,108
EBA.994 Layanan Perkantoran	6,313,181,000	0	5,639,619,611	662,976,281	6,302,595,892	99.83 %	10,585,108
001 Gaji dan Tunjangan	6,313,181,000	0	5,639,619,611	662,976,281	6,302,595,892	99.83 %	10,585,108
001.0A Gaji dan Tunjangan	3,898,521,000	0	3,583,244,972	307,965,231	3,891,210,203	99.81 %	7,310,797
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,444,926,000	0	1,334,044,980	110,880,980	1,444,925,960	100.00	40
000001. Belanja Gaji Pokok PNS	1,444,926,000	0	1,334,044,980	110,880,980	1,444,925,960	100.00	40
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	28,000	0	19,769	1,453	21,222	75.79 %	6,778
000002. Belanja Pembulatan Gaji PNS	28,000	0	19,769	1,453	21,222	75.79 %	6,778
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	76,830,000	0	71,504,500	5,325,440	76,829,940	100.00	60
000003. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	76,830,000	0	71,504,500	5,325,440	76,829,940	100.00	60
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	20,814,000	0	19,261,808	1,540,696	20,802,504	99.94 %	11,496
000004. Belanja Tunj. Anak PNS	20,814,000	0	19,261,808	1,540,696	20,802,504	99.94 %	11,496
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	121,950,000	0	113,445,000	8,505,000	121,950,000	100.00	0
000005. Belanja Tunj. Struktural PNS	121,950,000	0	113,445,000	8,505,000	121,950,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	12,176,000	0	12,079,954	95,346	12,175,300	99.99 %	700
000006. Belanja Tunj. PPh PNS	12,176,000	0	12,079,954	95,346	12,175,300	99.99 %	700
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	69,886,000	0	64,598,640	5,286,660	69,885,300	100.00	700
000007. Belanja Tunj. Beras PNS	69,886,000	0	64,598,640	5,286,660	69,885,300	100.00	700
511129 Belanja Uang Makan PNS	220,371,000	0	175,610,000	37,470,000	213,080,000	96.69 %	7,291,000
000008. Belanja Uang Makan PNS	220,371,000	0	175,610,000	37,470,000	213,080,000	96.69 %	7,291,000
511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	171,140,000	0	155,995,000	15,145,000	171,140,000	100.00	0
000009. Tunjangan Khusus	171,140,000	0	155,995,000	15,145,000	171,140,000	100.00	0
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	57,510,000	0	52,715,000	4,795,000	57,510,000	100.00	0
000010. Belanja Tunjangan Umum PNS	57,510,000	0	52,715,000	4,795,000	57,510,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Unit Organisasi** : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Satuan Kerja** : 654598 **KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

Hal 4 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,702,890,000	0	1,583,970,321	118,919,656	1,702,889,977	100.00	23
000011. Belanja Pegawai (TUKIN)	1,702,890,000	0	1,583,970,321	118,919,656	1,702,889,977	100.00	23
001.0B Uang Kehormatan	1,171,397,000	0	1,071,723,168	99,673,200	1,171,396,368	100.00	632
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,171,397,000	0	1,071,723,168	99,673,200	1,171,396,368	100.00	632
000012. Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,171,397,000	0	1,071,723,168	99,673,200	1,171,396,368	100.00	632
001.0C PPPK	1,243,263,000	0	984,651,471	255,337,850	1,239,989,321	99.74 %	3,273,679
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	495,009,000	0	416,272,465	78,627,200	494,899,665	99.98 %	109,335
000013. Gaji Pokok PPPK	495,009,000	0	416,272,465	78,627,200	494,899,665	99.98 %	109,335
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	18,000	0	4,295	811	5,106	28.37 %	12,894
000014. Pembulatan Gaji PPPK	18,000	0	4,295	811	5,106	28.37 %	12,894
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,557,000	0	12,339,900	2,216,830	14,556,730	100.00	270
000074. Tunjangan Suami Istri PPPK	14,557,000	0	12,339,900	2,216,830	14,556,730	100.00	270
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,057,000	0	4,286,133	722,200	5,008,333	99.04 %	48,667
000015. Tunjangan Anak PPPK	5,057,000	0	4,286,133	722,200	5,008,333	99.04 %	48,667
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	50,400,000	0	43,920,000	6,480,000	50,400,000	100.00	0
000016. Tunjangan Fungsional PPPK	50,400,000	0	43,920,000	6,480,000	50,400,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	23,247,000	0	19,698,240	3,548,580	23,246,820	100.00	180
000017. Tunjangan Beras PPPK	23,247,000	0	19,698,240	3,548,580	23,246,820	100.00	180
511628 Belanja Uang Makan PPPK	109,400,000	0	72,873,000	33,426,000	106,299,000	97.17 %	3,101,000
000018. Uang Makan PPPK	109,400,000	0	72,873,000	33,426,000	106,299,000	97.17 %	3,101,000
511632 Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	60,800,000	0	50,900,000	9,900,000	60,800,000	100.00	0
000019. Tunjangan Khusus Papua PPPK	60,800,000	0	50,900,000	9,900,000	60,800,000	100.00	0
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	15,589,000	0	12,708,406	2,880,000	15,588,406	100.00	594
000020. Tunjangan Umum PPPK	15,589,000	0	12,708,406	2,880,000	15,588,406	100.00	594
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	469,186,000	0	351,649,032	117,536,229	469,185,261	100.00	739
000021. Tukin PPPK, Tunjangan Khusus, Tunjangan Pajak	469,186,000	0	351,649,032	117,536,229	469,185,261	100.00	739

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Unit Organisasi** : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Satuan Kerja** : 654598 **KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

Hal 5 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Penghasilan	469,186,000	0	351,649,032	117,536,229			739
WA.3358 Pengelolaan Sumber Daya Manusia	730,783,000	0	730,675,460	81,000	730,756,460	100.00	26,540
<b>EBC Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>730,783,000</b>	<b>0</b>	<b>730,675,460</b>	<b>81,000</b>	<b>730,756,460</b>	<b>100.00</b>	<b>26,540</b>
<b>EBC.954 Layanan Manajemen SDM</b>	<b>730,783,000</b>	<b>0</b>	<b>730,675,460</b>	<b>81,000</b>	<b>730,756,460</b>	<b>100.00</b>	<b>26,540</b>
<b>064 Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</b>	<b>730,783,000</b>	<b>0</b>	<b>730,675,460</b>	<b>81,000</b>	<b>730,756,460</b>	<b>100.00</b>	<b>26,540</b>
064.0A Seleksi Komisioner	730,783,000	0	730,675,460	81,000	730,756,460	100.00	26,540
521211 Belanja Bahan	94,550,000	0	94,530,900	0	94,530,900	99.98 %	19,100
000078. ATK dan Konsumsi	94,550,000	0	94,530,900	0	94,530,900	99.98 %	19,100
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	122,400,000	0	122,400,000	0	122,400,000	100.00	0
000077. Honor	122,400,000	0	122,400,000	0	122,400,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	21,899,000	0	21,818,000	81,000	21,899,000	100.00	0
000082. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	21,899,000	0	21,818,000	81,000	21,899,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000076. Sewa Kantor	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	107,962,000	0	107,962,000	0	107,962,000	100.00	0
000079. Pengadaan alat tes seleksi	107,962,000	0	107,962,000	0	107,962,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	363,972,000	0	363,964,560	0	363,964,560	100.00	7,440
000080. Perdin	363,972,000	0	363,964,560	0	363,964,560	100.00	7,440
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	6,486,235,000	0	5,307,732,825	1,177,998,666	6,485,731,491	99.99 %	503,509
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>6,396,558,000</b>	<b>0</b>	<b>5,218,971,675</b>	<b>1,177,098,666</b>	<b>6,396,070,341</b>	<b>99.99 %</b>	<b>487,659</b>
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>6,396,558,000</b>	<b>0</b>	<b>5,218,971,675</b>	<b>1,177,098,666</b>	<b>6,396,070,341</b>	<b>99.99 %</b>	<b>487,659</b>
<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>6,396,558,000</b>	<b>0</b>	<b>5,218,971,675</b>	<b>1,177,098,666</b>	<b>6,396,070,341</b>	<b>99.99 %</b>	<b>487,659</b>
002.0A Layanan Perkantoran	4,624,328,000	0	4,496,725,794	127,468,541	4,624,194,335	100.00	133,665
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,615,780,000	0	1,590,260,191	25,466,604	1,615,726,795	100.00	53,205
000022. Honor Satpam dan Sopir	929,873,000	0	914,368,988	15,503,808	929,872,796	100.00	204
000023. Honor Petugas Kebersihan/Pramubakti	450,577,000	0	450,544,638	0	450,544,638	99.99 %	32,362

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Unit Organisasi** : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Satuan Kerja** : 654598 **KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

Hal 6 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000024. Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) Bagi Satpam/Sopir	150,473,000	0	150,473,000	0	150,473,000	100.00	0
000025. Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) Bagi Petugas Kebersihan/Pramubakti	34,940,000	0	34,764,542	155,196	34,919,738	99.94 %	20,262
000073. Langganan Koran, Air Minum Pegawai, dan Keperluan Perkantoran Lainnya	49,917,000	0	40,109,023	9,807,600	49,916,623	100.00	377
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,397,000	0	3,684,700	691,000	4,375,700	99.52 %	21,300
000026. Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,397,000	0	3,684,700	691,000	4,375,700	99.52 %	21,300
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	59,160,000	0	47,280,000	11,880,000	59,160,000	100.00	0
000027. Honor KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staf Pengelola dan PPBJ	59,160,000	0	47,280,000	11,880,000	59,160,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	133,800,000	0	119,657,297	14,102,044	133,759,341	99.97 %	40,659
000031. Biaya Listrik	133,800,000	0	119,657,297	14,102,044	133,759,341	99.97 %	40,659
522141 Belanja Sewa	1,296,330,000	0	1,296,330,000	0	1,296,330,000	100.00	0
000032. Sewa Kendaraan Eselon II	975,480,000	0	975,480,000	0	975,480,000	100.00	0
000081. Sewa Kendaraan Roda Empat Eselon III	320,850,000	0	320,850,000	0	320,850,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	1,208,544,000	0	1,190,801,301	17,734,943	1,208,536,244	100.00	7,756
000034. Belanja Jasa Internet	21,995,000	0	18,252,578	3,734,943	21,987,521	99.97 %	7,479
000055. Tenaga Administrasi PPNPN (39 Orang)	1,186,549,000	0	1,172,548,723	14,000,000	1,186,548,723	100.00	277
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65,742,000	0	48,242,500	17,488,800	65,731,300	99.98 %	10,700
000035. Perawatan Gedung dan Bangunan serta halaman	65,742,000	0	48,242,500	17,488,800	65,731,300	99.98 %	10,700
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	235,690,000	0	195,584,805	40,105,150	235,689,955	100.00	45
000036. Servis Kendaraan dan Peralatan Elektronik Kantor	235,690,000	0	195,584,805	40,105,150	235,689,955	100.00	45
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,885,000	0	4,885,000	0	4,885,000	100.00	0
000056. Perjalanan Ke KPPN/KPKNL/Kanwil DJPBN	4,885,000	0	4,885,000	0	4,885,000	100.00	0
002.0B Sosialisasi Pendidikan Pemilih	47,128,000	0	36,701,700	10,410,550	47,112,250	99.97 %	15,750
521211 Belanja Bahan	4,700,000	0	786,200	3,913,800	4,700,000	100.00	0
000125. ATK, Zoom Meeting (1000 Peserta), dan Konsumsi	4,700,000	0	786,200	3,913,800	4,700,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	14,100,000	0	7,602,900	6,496,750	14,099,650	100.00	350

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Unit Organisasi** : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Satuan Kerja** : 654598 **KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

Hal 7 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000108. Narasumber Podcast dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	100.00	0
000123. Honor Narasumber	8,100,000	0	7,602,900	496,750	8,099,650	100.00	350
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,328,000	0	28,312,600	0	28,312,600	99.95 %	15,400
000109. Perdin Rakor Sosialisasi Pendidikan Pemilih	28,328,000	0	28,312,600	0	28,312,600	99.95 %	15,400
002.0C Rapat Koordinasi Nasional KPU	600,392,000	0	253,452,443	346,913,446	600,365,889	100.00	26,111
521211 Belanja Bahan	2,525,000	0	0	2,524,800	2,524,800	99.99 %	200
000110. ATK dan Konsumsi	2,525,000	0	0	2,524,800	2,524,800	99.99 %	200
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	597,867,000	0	253,452,443	344,388,646	597,841,089	100.00	25,911
000111. Konsultasi Penyusunan dan Juknis Anggaran 2026	57,726,000	0	57,721,730	0	57,721,730	99.99 %	4,270
000112. Konsolidasi, Koordinasi, Supervisi, Monitoring, Pendampingan, Dan Evaluasi (Progam Perencanaan)	171,247,000	0	171,154,453	71,400	171,225,853	99.99 %	21,147
000126. Monitoring Kontrol Pagu Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	200,000,000	0	0	199,999,705	199,999,705	100.00	295
000128. Program Kegiatan Perencanaan	168,894,000	0	24,576,260	144,317,541	168,893,801	100.00	199
002.0D Monitoring dan Evaluasi PBJ	32,012,000	0	31,922,937	87,000	32,009,937	99.99 %	2,063
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,012,000	0	31,922,937	87,000	32,009,937	99.99 %	2,063
000114. Monitoring dan Evaluasi PBJ	32,012,000	0	31,922,937	87,000	32,009,937	99.99 %	2,063
002.0E Fasilitas Rapat Koordinasi Teknis Pemilu dan Pilkada	26,718,000	0	26,636,793	0	26,636,793	99.70 %	81,207
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,718,000	0	26,636,793	0	26,636,793	99.70 %	81,207
000115. Koordinasi Teknis Pemilu dan Pilkada Tingkat Nasional	26,718,000	0	26,636,793	0	26,636,793	99.70 %	81,207
002.0F Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	27,796,000	0	27,610,100	184,000	27,794,100	99.99 %	1,900
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,796,000	0	27,610,100	184,000	27,794,100	99.99 %	1,900
000116. Perdin	27,796,000	0	27,610,100	184,000	27,794,100	99.99 %	1,900
002.0G Tambahan Revisi Dipa	229,810,000	0	56,264,656	173,525,929	229,790,585	99.99 %	19,415
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	229,810,000	0	56,264,656	173,525,929	229,790,585	99.99 %	19,415
000118. Perjadiin Menghadiri Undangan KPU RI (Proogram Perencanaan)	30,226,000	0	30,225,160	0	30,225,160	100.00	840
000129. Tambahan Kegiatan SDM Rev 5 DJA	199,584,000	0	26,039,496	173,525,929	199,565,425	99.99 %	18,575

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Unit Organisasi** : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Satuan Kerja** : 654598 **KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

Hal 8 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0H Rapat Pleno PDPB TA 2025	26,730,000	0	0	26,727,300	26,727,300	99.99 %	2,700
521211 Belanja Bahan	26,730,000	0	0	26,727,300	26,727,300	99.99 %	2,700
000119. ATK dan Snack	26,730,000	0	0	26,727,300	26,727,300	99.99 %	2,700
002.0I Pendataan DPT Berkelanjutan	40,498,000	0	31,995,200	8,457,000	40,452,200	99.89 %	45,800
521211 Belanja Bahan	2,880,000	0	0	2,880,000	2,880,000	100.00	0
000120. ATK dan Snack	2,880,000	0	0	2,880,000	2,880,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,618,000	0	31,995,200	5,577,000	37,572,200	99.88 %	45,800
000121. Menghadiri Koordinasi Sinkronisasi dan Validasi Data PDPB dan Rapat Pleno Rekap PDPB tingkat Nasional di Jakarta	37,618,000	0	31,995,200	5,577,000	37,572,200	99.88 %	45,800
002.AA Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu dan Pemilihan	79,604,000	0	29,272,286	50,253,900	79,526,186	99.90 %	77,814
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,604,000	0	29,272,286	50,253,900	79,526,186	99.90 %	77,814
000113. Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu dan Pemilihan	79,604,000	0	29,272,286	50,253,900	79,526,186	99.90 %	77,814
002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	44,638,000	0	17,550,500	27,073,500	44,624,000	99.97 %	14,000
521211 Belanja Bahan	44,638,000	0	17,550,500	27,073,500	44,624,000	99.97 %	14,000
000096. Sampul/Folder/Map Gantung/Sekat	17,638,000	0	7,700,000	9,938,000	17,638,000	100.00	0
000132. ATK dan Box Arsip Bahan Karton	12,000,000	0	9,850,500	2,135,500	11,986,000	99.88 %	14,000
000133. Konsumsi Makan dan Minum dalam Pelaksanaan Kegiatan Penataan Arsip Kantor	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	100.00	0
002.TB Tambahan Rev. 4	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
000101. Dukungan layanan perkantoran, untuk sewa rumah Dinas Sek Papua Barat (Sdr. Mote),	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
002.TR Tambahan Rev. 4	100,772,000	0	100,750,048	0	100,750,048	99.98 %	21,952
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	100,772,000	0	100,750,048	0	100,750,048	99.98 %	21,952
000117. Tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Anggota KPU di Provinsi Papua Barat,	100,772,000	0	100,750,048	0	100,750,048	99.98 %	21,952
002.TS Tambahan Rev 5 DJA	466,132,000	0	60,089,218	405,997,500	466,086,718	99.99 %	45,282
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	399,040,000	0	0	398,996,500	398,996,500	99.99 %	43,500

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Unit Organisasi** : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Satuan Kerja** : 654598 **KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

Hal 9 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000131. Pengadaan Pakaian Dinas CPNS dan PPPK	399,040,000	0	0	398,996,500	398,996,500	99.99 %	43,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,092,000	0	60,089,218	7,001,000	67,090,218	100.00	1,782
000130. Perjadin	67,092,000	0	60,089,218	7,001,000	67,090,218	100.00	1,782
<b>EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>89,677,000</b>	<b>0</b>	<b>88,761,150</b>	<b>900,000</b>	<b>89,661,150</b>	<b>99.98 %</b>	<b>15,850</b>
<b>EBB.951 Layanan Sarana Internal</b>	<b>89,677,000</b>	<b>0</b>	<b>88,761,150</b>	<b>900,000</b>	<b>89,661,150</b>	<b>99.98 %</b>	<b>15,850</b>
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	89,677,000	0	88,761,150	900,000	89,661,150	99.98 %	15,850
053.0A Sarana Prasarana Kantor	89,677,000	0	88,761,150	900,000	89,661,150	99.98 %	15,850
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89,677,000	0	88,761,150	900,000	89,661,150	99.98 %	15,850
000084. Sarpras untuk CPNS dan PPPK	89,677,000	0	88,761,150	900,000	89,661,150	99.98 %	15,850
WA.7018 Pendataan DPT Berkelanjutan	27,936,000	0	27,868,125	0	27,868,125	99.76 %	67,875
<b>QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga</b>	<b>27,936,000</b>	<b>0</b>	<b>27,868,125</b>	<b>0</b>	<b>27,868,125</b>	<b>99.76 %</b>	<b>67,875</b>
<b>QDB.002 Fasilitas Pendataan DPT Berkelanjutan</b>	<b>27,936,000</b>	<b>0</b>	<b>27,868,125</b>	<b>0</b>	<b>27,868,125</b>	<b>99.76 %</b>	<b>67,875</b>
111 Fasilitas Pendataan DPT Berkelanjutan	27,936,000	0	27,868,125	0	27,868,125	99.76 %	67,875
111.0A Fasilitas PDPB	27,936,000	0	27,868,125	0	27,868,125	99.76 %	67,875
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,936,000	0	27,868,125	0	27,868,125	99.76 %	67,875
000075. Perdin Rakor	27,936,000	0	27,868,125	0	27,868,125	99.76 %	67,875

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir